

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 9 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Bongkar Situs Judi, Tangkap Sebelas Orang

Sambungan dari hal 1

Satu tersangka berinisial R merupakan *leader* dari situs judi dan sisanya bertugas dalam pengoperasian. Dari semua tersangka, disita 12 laptop dan 21 *handphone*. "Ada juga satu kotak SIM card," terangnya di lobi Bareskrim.

Menurut dia, dalam kasus itu juga diterapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat ini masih dilakukan penelusuran terkait uang hasil kejahatannya. "Yang pasti kami jerat TPPU," jelasnya.

Terkait situs judi *online*, Polri selama 2023 telah mengungkap 77 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 130 orang. Dia mengatakan, masyarakat diharapkan tidak melakukan praktik-praktik perjudian. "Kita berantas bersama-sama," paparnya.

Sementara itu, terkait pesohor Wulan Guritno, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa penjadwalan ulang pemeriksaan terhadapnya akan dilakukan. Nanti disesuaikan dengan jadwal. "Yang pasti minggu depan," terangnya.

Diketahui, Wulan Guritno meminta penundaan pemeriksaan karena merasa kurang sehat. Namun, dalam *Instagram*-nya, Wulan justru mengunggah sudah dalam keadaan sehat serta terlihat sedang berada di dalam pesawat.

Unggahan tersebut dilakukan di hari yang sama pada Kamis (7/9) saat dipanggil Bareskrim untuk klarifikasi.

Menanggapi hal itu, Karopenmas mengaku masih mengacu pada informasi Dittipid Siber. Yakni, penundaan disebabkan Wulan Guritno merasa kurang sehat. "Mengacu ke sebelumnya dulu," katanya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menanggapi usulan untuk memajaki judi *online*. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menuturkan, belum ada pembahasan terkait usulan tersebut.

"Sampai saat ini, belum ada pembahasan secara spesifik terkait pengenaan

pajak atas judi *online* tersebut," ujarnya kepada *Jawa Pos* kemarin.

Sebagaimana diketahui, usulan yang diutarakan Menkominfo Budi Arie Setiadi itu mencuat pada raker dengan Komisi I DPR Senin (4/9). Padahal, pemajakan judi *online* atau melegalkan perjudian tentu kontradiktif dengan upaya memberantas judi *online* ilegal.

Meski begitu, Dwi menyebut DJP akan menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk melihat potensi pemajakan. "Namun, pada dasarnya, DJP selalu melakukan penggalan potensi pajak atas seluruh aktivitas ekonomi demi kemaslahatan bersama," tuturnya. (idr/dee/c19/ttg)